

KENDALI EKONOMI OUTLOOK INDONESIA TAHUN 2021 PASCA PANDEMI GLOBAL DITINJAU DARI MIKRO DAN MAKRO EKONOMI

Oleh :

A. Dirwan

Guru Besar Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta
Email : adirwan@unsurya.ac.id

Pandemi Covid 19 telah mengganggu tata kelola dunia, lebih spesifik terhadap ekonomi, yang mengarah kepada krisis kehidupan manusia. Penyebaran atau infeksi virus corona telah tersebar di 76 negara, serta perang dagang, perang mata uang, dan gejolak geopolitik di berbagai negara, telah membuat situasi tidak menentu. Bagi Indonesia, banyak ekonom yang menilai tantangannya jauh lebih berat. Bukan hanya ancaman corona yang menjadi faktornya, tetapi fundamental dalam negeri juga bermasalah. Beban utang yang menggunung dan terus ditumpuk, ibarat bom waktu, yang dikawatirkan banyak pengamat. Corona dan tekanan lainnya, hanya menjadi detonator pemicu ledakan. Pemerintah telah berusaha, dengan menggelontorkan sejumlah paket stimulus, yang membuat pemerintah merogoh kocek lebih dalam. Pertanyaannya, dengan tekanan ekonomi saat ini, seberapa kuat pemerintah dapat menahannya. Sebagai bangsa kita tentu harus optimis, pemerintah akan mampu mencari jalan keluar dari berbagai tantangan ini. Kita semua harus terus ikut memberikan sumbang saran, agar pemerintah tidak mengambil langkah yang salah dan dapat berujung kepada semakin memburuknya situasi.

Di samping itu, perdebatan pertumbuhan ekonomi versus perlindungan lingkungan sering muncul. Covid 19 semestinya menjadi pertanda dengan bukti bahwa mengabaikan lingkungan demi pembangunan, dapat membawa kehancuran lebih parah lagi bagi perekonomian. Pandemi covid 19 merupakan peringatan kepada manusia agar berhenti mengeksploitasi bumi melampaui batas kemampuannya. Deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati dan perubahan iklim, dipercaya telah membuat pandemi lebih mungkin terjadi.

Selanjutnya bila kita cermati beberapa point yang merupakan efek Covid 19 terhadap Ekonomi:

- Pertumbuhan ekonomi negatif (kegiatan ekonomi mengalami hambatan, terutama titik supply, demand dan produksi).
- Pendidikan terhambat, walau dapat dilaksanakan secara online, namun hasilnya terbatas. Sekolah ditutup para karyawan kehilangan pekerjaan, guru/Dosen tidak dapat mentransper ilmu secara optimal, pelajar mengalami kebosanan tinggal dirumah, yang lama-lama akan mempengaruhi psikologis mereka.
- Kesehatan mengalami penurunan, rumah sakit penuh, pekerja kesehatan dan pekerja produktif banyak yang sakit, sehingga masuk kerja terbatas, menambah biaya tanggungan badan usaha.
- Para pekerja tidak tetap (serabutan) kehilangan pendapatan, dan meningkatnya pengangguran (Agustus 2020, 7,07 %).

- Hantaman terhadap sumber produksi; suplay terhenti, makro ekonomi mengalami penurunan, kemampuan daya beli masyarakat berkurang, serta banyak orang mengulur waktu untuk berbelanja dan investasi.
- Aspek Kedirgantaraan khususnya dunia penerbangan; rata-rata penurunan *Load Factor* 22,9 %, dibandingkan tahun 2019 (jumlah penumpang penerbangan internasional -52 %), 26 maskapai penerbangan dunia bangkrut, 15 perusahaan penerbangan domestik mengurangi rute dan frekuensi penerbangan, Garuda mengurangi penerbangan internasional dari 30 menjadi 11 rute, berkurang keuangan perusahaan, supply spare part terhambat karena negara produsen mengurangi produksinya, sehingga pesawat grounded.

Dari fenomena di atas timbul pertanyaan tentang ekonomi (Economic Questions):

- Berapa besar dan berapa cepat kerusakan ekonomi yang terjadi.
- Berapa lama kerusakan dapat diperbaiki.
- Apa mekanisme pemulihan ekonomi akibat pandemi.
- Apa solusi pemerintah.

Diharapkan vaksin sudah tersedia dan dapat digunakan pada awal tahun 2021, yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, bahwa virus telah dapat dikendalikan. Masyarakat kelas menengah-atas mulai membuka pundi-pundinya untuk berbelanja. Permintaan yang meningkat akan menggerakkan pengusaha untuk menambah produksi. Modal dibutuhkan, sehingga kredit bank akan keluar, yang diharapkan semua kembali berjalan normal.

Dari porsi konsumsi terhadap PDB, pembelanja terbesar berasal dari kelompok atas dan menengah. Sebanyak 40 % penduduk termiskin hanya menyumbang 17,7 % belanja. Postur konsumsi domestik inilah yang menyebabkan pandemi memukul amat kencang perekonomian kita. Pendapatan kelompok menengah-bawah turun, sehingga daya beli mereka berkurang, walaupun sudah mendapat bantuan sosial dari pemerintah. Sementara itu, kelompok menengah-atas menahan belanja, terlihat dari dana tabungan di perbankan meningkat, sebagai indikasi belanja ditahan.

Selanjutnya beberapa harapan tahun 2021

- Pandemi covid 19 menurun dan ditemukan Vaksin yang tepat.
- Ekonomi ditata, sehingga berjalan dengan baik (pertumbuhan positif).
- Kebijakan fiscal dan moneter yang tepat.
- Pendidikan dikelola dengan profesional (anggaran 2021, 550 T Rupiah dikelola seefektif mungkin).
- Pemimpin yang baik; bukan hanya baik perkataan dan penampilan, tapi mempunyai program untuk kemajuan bangsa dan tidak korupsi.

Kedepan apa yang dapat dilakukan pemerintah:

- Kebijakan keuangan dan fiscal dengan stimulus khusus.
- Bantuan sosial bagi masyarakat kelas menengah-bawah, seperti untuk pemeliharaan kesehatan, pembayaran listrik dan kebutuhan sembako.
- Mengurangi pajak bagi usaha kecil.
- Menurunkan suku bunga perbangkan.
- Khusus aspek penerbangan (kedirgantaraan); stimulus bagi pengguna transportasi udara (pembebasan biaya pelayanan jasa penumpang pesawat udara/PJPPU), pembebasan biaya pendaratan, perpanjangan masa berlaku sertifikat dan lisensi dengan tetap

mempedomani ALOS, meningkatkan kepercayaan masyarakat pada perusahaan penerbangan (penumpang seminimal mungkin, sertifikat kesehatan, pembersihan udara dalam pesawat setiap lima jam).

Selanjutnya implementasi seluruh konsep di atas tidak akan berarti tanpa tata kelola negara yang baik (**Good Governance**).

Fenomena pada akhir-akhir ini termasuk pengaruh pandemi Covid 19, semakin luntarnya pemahaman tentang semangat kebangsaan, menipisnya rasa nasionalisme dan patriotisme komponen bangsa, serta mengarah kepada negara gagal. Negara gagal adalah apabila tidak *capable* dalam penegakkan hukum, melindungi masyarakat, menjamin hak warga negara dan partisipasi politik, menjamin keamanan, memenuhi kebutuhan infrastruktur serta berbagai fungsi sosial. Salah satu upaya adalah meningkatkan pemahaman konsep pengelolaan negara dengan menciptakan *Good Governance*. Melalui partisipasi seluruh komponen bangsa, pengelolaan negara secara transparan dan tegaknya hukum akan meningkatkan sikap komponen bangsa terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Sikap kepedulian, kesetaraan dan kebersamaan akan menumbuhkan rasa persatuan dalam mewujudkan tujuan Negara, termasuk pembangunan ekonomi pasca covid 19. Di samping itu apabila manajemen negara dilaksanakan dengan visi yang tepat, efektif dan efisien, serta secara bertanggung jawab akan tercipta suatu dorongan dalam mewujudkan negara yang kuat jauh dari kegagalan. Hal pokok *governance* terletak pada relasi antar pihak yang dilandasi oleh kesetaraan agar sinergi antar mereka dapat dikembangkan. Oleh karena itu, *governance* membutuhkan *willingness* dari masing-masing untuk mengembangkan kerjasama, konsensus, dan akomodasi, termasuk dalam melawan covid 19.

Dari berbagai penjelasan perihal penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), untuk konteks Indonesia pada hakikatnya sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 : “...membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”.

Berdasarkan hal tersebut, ada empat point sebagai indikator umum bagi suatu tata pemerintahan Indonesia yang baik : *Pertama*; Perlindungan yang maksimal terhadap warga negara, semangat non-diskriminasi atas segala kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan. *Kedua*; Memajukan kesejahteraan umum termasuk peningkatan ekonomi, kepentingan yang dijunjung oleh pemerintahan mestilah paralel dengan kepentingan rakyat, segala sumber daya yang dimiliki negara digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran bersama. *Ketiga*; Mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan sebagai sarana untuk hadirnya kecerdasan bagi warga negara harus menjadi prioritas, pemerintah merespon setiap perubahan dan kebutuhan yang ada dalam masyarakat, terutama yang terkait dengan tranformasi ilmu pengetahuan dan keterbukaan informasi. *Keempat*; Hubungan internasional yang berprinsip pada kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial.

Kunci utama memahami *Good Governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip tersebut, akan didapatkan tolok ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur-unsur *Good Governance*. Prinsip-prinsip *Good Governance* secara umum meliputi sembilan aspek (UNDP, 1997), namun sesuai dengan

tujuan seminar ini, akan di sampaikan empat aspek penting yang sangat bersinggungan dengan tema seminar, yaitu pengendalian ekonomi:

- a. **Supremasi Hukum.** Kerangka hukum harus dilaksanakan secara adil dan diperlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Prinsip supremasi hukum antara lain mencakup upaya pembentukan peraturan perundangan-undangan, pemberdayaan lembaga-lembaga penegak hukum, penuntasan kasus KKN dan pelanggaran HAM, peningkatan kesadaran hukum dan pengembangan budaya hukum. Ketaatan hukum memberikan landasan bagi pemerintah dalam menjalankan visi dan misi yang di emban sekaligus memperlihatkan tingkat akseptabilitas masyarakat terhadap pemerintah. Dalam hubungan tersebut dibutuhkan kesadaran pemimpin untuk memberikan contoh sehingga mampu mendorong terwujudnya tertib hukum.
- b. **Transparansi.** Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan dan informasi dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Semua urusan tata pemerintahan berupa kebijakan-kebijakan publik yang berkenaan dengan pelayanan harus diketahui publik. Isi keputusan dan alasan pengambilan kebijakan, harus dapat diakses oleh publik dan harus diumumkan agar mendapat tanggapan. Transparansi diperlukan untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai.
- c. **Adil.** Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka, berdasarkan kesetaraan. Instrumen dasarnya adalah peraturan perundang-undangan yang menjamin kesetaraan, dengan komitmen politik terhadap penegakkan hukum dan perlindungan HAM. Adil merupakan karakteristik yang dapat mendorong akseptabilitas masyarakat pada pemerintahnya.
- d. **Akuntabilitas.** Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab, baik kepada masyarakat itu sendiri dan kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Penerapan prinsip akuntabilitas atau bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan diawali pada saat penyusunan program pembangunan (*program accountability*), pelaksanaan, dan penilaiannya (*process accountability*), sehingga program tersebut dapat memberikan hasil sesuai dengan tujuan yang ditetapkan (*outcome accountability*).